

## MEKANISME KOORDINASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN X PROVINSI SUMATERA BARAT

COORDINATION MECHANISM COVID-19 RESPONSE ACCELERATION TASK FORCE IN DEALING WITH THE COVID-19 PANDEMIC IN X REGENCY, WEST SUMATERA PROVINCE

Z.A. Prima Putri<sup>1\*</sup>, Syahirul Alim<sup>2</sup>, Dwi Handono Sulisty<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat

<sup>2</sup>Departemen Keperawatan

<sup>3</sup>Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

<sup>123</sup>Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan  
Universitas Gadjah Mada

### ABSTRACT

**Background:** Coordination is key to the success of disaster management when many parties are involved. However, in carrying out coordination in District X, it is known that there are obstacles, so coordination has not run as it should.

**Objective:** This study aims to explore cross-sectoral coordination (COVID-19 Response Acceleration Task Force) in dealing with the COVID-19 pandemic in the X Regency.

**Methods:** This is qualitative descriptive research with seven informants from BPBD and X District Health Office. Data was collected through in-depth interviews with transectional data collection, which only captures the situation at a specific time of the entire longitudinal phase of the disaster, precisely when the COVID-19 Omicron variant developed. Data validation was done by triangulation of sources.

**Results:** The mutual adjustment mechanism has been made by holding meetings to discuss developing issues and compiling. In addition, non-formal communication is also carried out through Whatsapp groups. The direct supervision mechanism carried out by the head of the task force is monitoring and evaluation based on reporting in each implementing field through in-person or online meetings. The process of standardisation mechanism was not carried out because the activities within the task force were deemed to have been integrated with the duties of each regional apparatus institution, so it was sufficient to refer to the guidelines that had been prepared at the central level as a form of standardised activity.

**Conclusion:** The dominant coordination mechanism carried out during the COVID-19 pandemic disaster by the task force in X Regency was mutual adjustment and direct supervision.

**Keywords:** COVID-19, disaster management, coordination

### ABSTRAK

**Latar belakang:** Penanggulangan COVID-19 dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi perangkat daerah. Koordinasi menjadi penentu keberhasilan dari manajemen bencana disaat banyaknya pihak yang terlibatnya. Namun dalam menjalankan koordinasi di Kabupaten X diketahui terdapat hambatan-hambatan sehingga koordinasi belum berjalan sebagaimana mestinya.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi koordinasi lintas sektor (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten X.

**Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian berjumlah 7 orang yang berasal dari BPBD dan Dinkes Kabupaten X. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengambilan data bersifat *transectional* yaitu hanya memotret pada satu waktu tertentu dari seluruh fase longitudinal bencana yaitu saat COVID-19 Varian Omicron berkembang. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber.

**Hasil:** Mekanisme penyesuaian bersama sudah dilakukan yaitu dengan komunikasi formal seperti mengadakan rapat membahas isu yang berkembang dan menyusun kegiatan. Selain itu komunikasi non formal juga dilakukan melalui *Whatsapp* grup. Mekanisme pengawasan langsung yang dilakukan oleh ketua gugus tugas yaitu monitoring dan evaluasi berdasarkan pelaporan setiap bidang pelaksana melalui rapat-rapat yang diadakan baik pertemuan yang bersifat langsung ataupun online. Mekanisme standarisasi proses tidak dilakukan karena kegiatan didalam gugus tugas dirasa sudah menyatu dengan tugas masing-masing institusi perangkat daerah, sehingga cukup mengacu pada pedoman yang sudah disusun ditingkat pusat sebagai bentuk kegiatan yang sudah terstandar.

**Kesimpulan:** Mekanisme koordinasi yang dominan dilakukan saat bencana pandemi COVID-19 oleh gugus tugas di Kabupaten X adalah mekanisme penyesuaian bersama dan pengawasan langsung.

**Kata kunci:** COVID-19, manajemen bencana, koordinasi

\*Penulis Korespondensi. Email: za.prima.putri@mail.ugm.ac.id

## PENDAHULUAN

COVID-19 ditetapkan secara resmi WHO sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Oleh karena penetapan tersebut, *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 ditetapkan sebagai bencana nasional kategori non-alam dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.<sup>1,2</sup> Kebijakan pembentukan gugus tugas ini juga diadopsi di tingkat daerah, melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, maka Kabupaten X sebagai salah satu provinsi di Sumatera Barat turut membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) disahkan melalui Keputusan Bupati X.<sup>3,4</sup>

Struktur dari gugus tugas tersebut merupakan gabungan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan dari keterlibatan banyak pihak tersebut, diketahui faktor yang menentukan keberhasilan manajemen bencana salah satunya adalah koordinasi. Koordinasi organisasi sangat penting untuk manajemen bencana yang efektif karena berbagai organisasi tersebut terlibat dalam semua fase manajemen bencana.<sup>5</sup> Meskipun koordinasi ini menjadi faktor keberhasilan suatu manajemen bencana, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat sekarang koordinasi menjadi suatu tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara luar.<sup>6-9</sup>

Tidak hanya ditingkat nasional, koordinasi juga menjadi salah satu tantangan di dalam manajemen bencana di tingkat regional.<sup>10</sup> Oleh karena itu, fenomena tersebut menarik dikaji lebih lanjut untuk melihat koordinasi gugus tugas yang terjadi di tingkat regional yaitu Kabupaten X dalam penanggulangan COVID-19.

### Manajemen Penanggulangan Bencana

Bencana (*disaster*) menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.<sup>11</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Selanjutnya penang-

gulangan bencana adalah upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tujuan dari upaya tersebut ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana. Selanjutnya mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya. Serta mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana.<sup>12</sup>

Rangkaian kegiatan manajemen penanggulangan bencana yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.<sup>13</sup> Tahapan tersebut menjelaskan bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.<sup>14</sup>

### Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Keadaan darurat kesehatan masyarakat dapat timbul dari berbagai penyebab, termasuk wabah penyakit menular yang mengancam jiwa, bencana alam, serta kontaminasi kimia lingkungan dan pelepasan radiasi. Dalam keadaan darurat, sejumlah besar orang memerlukan perhatian medis, sistem perawatan kesehatan yang berlebihan, dan terancamnya ketertiban umum.<sup>15</sup> Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (*International Health Regulations*). Melalui IHR, negara-negara telah sepakat untuk membangun kapasitas mereka untuk mendeteksi, menilai dan melaporkan kejadian kesehatan masyarakat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, menghadapi situasi pandemi ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan dilaksanakan sebagai respons atas kedaruratan kesehatan masyarakat berupa karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi, pembatasan sosial berskala besar, disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang. Selanjutnya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

## Koordinasi Lintas Sektor dalam Bencana

Koordinasi (*Coordination*) adalah salah satu dari kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen bencana yang dikenal dengan empat C yaitu *Command* (komando), *Control* (Pengendalian), *Coordination* (Koordinasi) dan *Communication* (Komunikasi).<sup>17</sup> Koordinasi dilakukan karena melibatkan multi sektor yang terkait dalam penanganan bencana. Berdasarkan tinjauan literatur menemukan bahwa sebagian besar studi menggunakan istilah koordinasi ketika menilai bagaimana organisasi bekerja sama dalam konteks bencana yang mendefinisikan koordinasi sebagai proses kolaboratif dimana organisasi menyelaraskan tindakan mereka dengan tindakan organisasi lain untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi adalah masalah tak terduga yang membutuhkan tindakan di antara organisasi lintas sektor. Terlepas dari itu, koordinasi seringkali membutuhkan pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola.<sup>18</sup>

## Mekanisme Koordinasi

Terdapat 3 (tiga) macam mekanisme koordinasi menurut Mintzberg diantaranya yaitu pertama Penyesuaian Bersama (*Mutual Adjustment*), yaitu mekanisme koordinasi yang mengutamakan komunikasi informal antarpetugas dalam melaksanakan tugas. Kedua Supervisi Secara Langsung (*Direct Supervision*), yaitu mekanisme koordinasi yang melibatkan seseorang sebagai penanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh petugas. Ketiga Standarisasi (*Standardization*) yang terdiri dari Standarisasi Keterampilan (*Standardization of Skills*), Standarisasi Proses Pekerjaan (*Standardization of Work Processes*), dan Standarisasi Hasil (*Standardization of Outputs*).<sup>19</sup> Mengidentifikasi mekanisme koordinasi yang efektif untuk mengelola entitas yang saling terkait dalam situasi bencana adalah salah satu tantangan terpenting bagi *Emergency Respons Coordination* (ERO) yang efektif untuk melindungi kehidupan manusia. Seperti yang ditunjukkan dalam model koordinasi Mintzberg merupakan mekanisme koordinasi yang sesuai untuk situasi dinamis yang tidak pasti yang kompleks. Menentukan kesesuaian mekanisme koordinasi dalam situasi bencana, maka mekanisme koordinasi Mintzberg yang mungkin dapat diterapkan adalah penyesuaian bersama, supervisi secara langsung dan standarisasi proses pekerjaan.<sup>20</sup>

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam untuk menggali lebih jauh tentang sudut pandang satuan gugus tugas yang memiliki pengalaman langsung terkait koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten X. Responden penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Responden berjumlah 7 orang berasal dari BPBD dan Dinas Kesehatan

Kabupaten X berdasarkan kriteria yaitu tergabung dalam struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan bertugas menjalankan tanggung jawab dalam penanganan COVID-19 tidak kurang dari 1 bulan.

Pengambilan data bersifat *transectional* yaitu hanya memotret pada satu waktu tertentu dari seluruh fase longitudinal bencana yaitu saat COVID-19 varian *Omicron* berkembang pada bulan Februari sampai Maret 2022. Variabel pada penelitian ini adalah mekanisme koordinasi Mintzberg yang meliputi penyesuaian bersama, pengawasan langsung, dan standarisasi proses. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dilakukan sendiri oleh peneliti menggunakan panduan pertanyaan umum dan dilakukan secara tatap muka langsung (*face-to-face*) dengan menerapkan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Peneliti juga melakukan wawancara tidak langsung dengan menggunakan *platform Zoom Meeting* karena kondisi untuk bertemu langsung dengan informan yang tidak memungkinkan. Peneliti dan informan tidak saling mengenal sebelumnya.

Selanjutnya pada analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten terarah (*Directed Content Analysis*).<sup>21</sup> Hasil rekaman wawancara yang telah dikumpulkan dibentuk menjadi sebuah transkrip. Kemudian pada proses penghayatan peneliti melakukan pencatatan pada kalimat-kalimat penting dan membuat penyederhanaan yang akhirnya akan dijabarkan dalam hasil dan pembahasan yang ditulis pada laporan penelitian. Sebagai bentuk keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu menggunakan beberapa sumber data yang berbeda.<sup>22</sup> Peneliti mewawancarai hal yang sama dengan informan yang memiliki sudut pandang berbeda untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dan peneliti juga melakukan telaah dokumen.

## HASIL

Peneliti menemukan bahwa mekanisme koordinasi yang dominan digunakan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten X yaitu mekanisme penyesuaian bersama dan pengawasan langsung.

## Mekanisme Penyesuaian Bersama

Mekanisme penyesuaian bersama tidak terlepas dari bagaimana komunikasi informal yang berlangsung antar anggota gugus tugas. Informan penelitian menyebutkan bahwa komunikasi antar anggota gugus tugas selama ini dilakukan melalui grup *Whatsapp*. Grup tersebut berisikan semua pejabat OPD yang tergabung di dalam SK Gugus Tugas. Komunikasi informal tidak hanya terjadi antar anggota saja, namun juga antara anggota dan koordinator. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan sebagai berikut :

*“Komunikasinya itu ya lewat grup Whatsapp. Di grup itu mulai dari bapak Bupati, kepala dinas lainnya dan anggota itu masuk di sana. Kalau ada info-info biasanya tahu dari grup itu” (Inf-7)*

Komunikasi yang dilakukan oleh gugus tugas biasanya terkait dengan data dan informasi seputar kasus COVID-19, pasien karantina, pasien dirawat, meninggal dan vaksin. Data tersebut bersumber dari Dinas Kesehatan. Data dan informasi yang sudah ada disebarkan ke semua anggota gugus tugas dengan alur yang sudah ditentukan. Alur dari data dan informasi tersebut yaitu Dinas kesehatan menyebarkan kepada Satgas COVID-19 masuk ke PUSDALOPS BPBD dan dihimpun oleh Dinas Kominfo. Selanjutnya untuk penyampaian informasi dan komunikasi dari gugus tugas disampaikan melalui juru bicara yang ditunjuk. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten X telah menunjuk juru bicara dari Dinas Kesehatan.

*“Di dalam gugus tugas itu ada juru bicaranya ya, jadi kami mendapatkan informasi biasanya dari Dinas Kesehatan karena yang menjadi juru bicara ini dari mereka...” (Inf-1)*

Mekanisme penyesuaian bersama juga dapat dilakukan melalui komunikasi formal dengan diadakannya pertemuan rutin. Pertemuan tersebut seperti rapat yang dapat diadakan secara tatap muka langsung. Gugus tugas diketahui melakukan pertemuan biasanya di gedung dan secara daring menggunakan *platform Zoom Meeting*. Rapat rutin biasanya dilakukan 1 kali dalam sebulan dan dapat pula bersifat insidental.

*“Dalam sebulan minimal mungkin ada 1 kali ya, tetapi juga ada yang sifatnya insidental atau dianggap perlu ...” (Inf-4)*

Adapun hambatan dalam melakukan pertemuan biasanya terkait mengatur jadwal pertemuan, terlebih institusi yang tergabung di dalam gugus tugas juga sangat banyak. Hal ini diungkapkan oleh informan penelitian sebagai berikut:

*“...paling mengkomunikasikan jadwal. Kan masing-masing punya tugas dan fungsi sendiri-sendiri ya gitu. Misalnya pertemuan harus hari ini itu yang agak ribet karena orangnya agak banyak.” (Inf-6)*

### **Mekanisme Pengawasan Langsung**

Mekanisme pengawasan langsung dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten X sudah dilakukan yaitu melalui penetapan Bupati sebagai ketua gugus tugas sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri No. 440/12622/SJ. Pengawasan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi melalui laporan bidang gugus tugas yang kemudian dibahas di dalam

rapat. Laporan tersebut dikumpulkan oleh Diskominfo kemudian diketahui oleh pimpinan atau wakil ketua gugus tugas yaitu Sekda.

*“Monitoring itu langsung dilakukan oleh Sekda, kegiatannya berupa pelaporan termasuk juga monev. Laporan itu berupa laporan tiap bidang-bidang yang terdiri dari banyak OPD tadi kan, itulah yang jadi laporan Satgas. Biasanya laporan itu disampaikan dan dibahas dalam rapat.” (Inf-1)*

Namun diketahui juga dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasinya saat ini intensitasnya berkurang.

*“Monitoring itu ya mungkin ada ya tetapi tidak begitu intens karena monitoring itu banyak diadakan di tingkat kabupatennya. Untuk ke bidang-bidang tidak terlalu intens...” (Inf-4)*

### **Mekanisme Standarisasi Proses**

Standarisasi ini adalah pedoman kerja yang telah distandarisasi dalam bentuk buku pedoman atau petunjuk teknis yang digunakan untuk menjalankan tugas. Diketahui bahwa gugus tugas COVID-19 Kabupaten X tidak memiliki buku pegangan ataupun buku petunjuk teknis khususnya untuk sektor penyedia data. Para anggota gugus tugas melaksanakan semua kegiatan atas uraian tugas yang ada di dalam SK saja, meskipun isi dari uraian tugas tersebut tidak detail secara teknis. Kegiatan di gugus tugas COVID-19 di Kabupaten X selama ini ternyata disesuaikan dengan perkembangan yang ada di lapangan dan isu strategis saat itu. Artinya tugas yang dijalankan selama ini sesuai SK dan arahan yang diberikan, apabila tidak ada arahan maka masing-masing OPD fokus ke tugas institusi.

*“Belum ada punya, kami melaksanakan tugas hanya sesuai SK dan arahan pusat atau provinsi” (Inf-6)*

Hal ini juga sejalan dengan hasil telaah dokumen bahwa memang tidak ditemukan adanya dokumen petunjuk teknis yang disusun oleh gugus tugas COVID-19, dokumen yang ada hanya Surat Keputusan Bupati yang di dalamnya terdapat uraian tugas yang menjadi acuan kerja.<sup>3</sup> Alasan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten X tidak menyiapkan untuk menyusun buku petunjuk atau juknis selama ini adalah karena tugas yang dilakukan dirasa semuanya sudah menyatu dengan tugas masing-masing institusi perangkat daerah. Selanjutnya pedoman tersebut telah disusun ditingkat pusat sebagai bentuk kegiatan yang standar.

### **PEMBAHASAN**

Mekanisme penyesuaian bersama dan pengawasan langsung diperlukan pada kondisi ketidakpastian,

sehingga tidak memungkinkan untuk lebih dahulu menspesifikasikan kegiatan koordinasi.<sup>23</sup> Sehingga apabila dilihat dari kondisi saat pandemi COVID-19, mekanisme koordinasi yang digunakan oleh Kabupaten X yaitu penyesuaian bersama dan pengawasan langsung mungkin cukup baik untuk menjadi fokus penerapan saat ini. Walaupun sebenarnya ketiga mekanisme koordinasi Mintzberg merupakan sebuah rangkaian kesatuan, diharapkan ketiga mekanisme ini kedepannya dapat dijalankan dengan baik di gugus tugas dalam penanggulangan krisis kesehatan.

### **Mekanisme Penyesuaian Bersama**

Penyesuaian bersama merupakan satu-satunya mekanisme koordinasi yang dapat berfungsi dalam keadaan yang sulit, oleh karena itu mekanisme ini menjadi penting dalam koordinasi. Namun di lapangan diketahui bahwa penyesuaian bersama ini tidak mudah untuk dilakukan. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pertemuan rutin seperti rapat, dijadikan momen oleh anggota gugus tugas untuk bertukar informasi. Lingkungan selama pandemi yang bersifat dinamis, mengakibatkan informasi dianggap sebagai aset utama yang harus diproduksi dan didistribusikan dalam jaringan antar lembaga baik dalam interaksi intra maupun antar lembaga.<sup>24</sup> Informasi sangat penting untuk mendukung koordinasi, apakah aktor memperoleh informasi yang dibutuhkan atau tidak tergantung pada arus informasinya.<sup>25</sup> Namun sekarang sudah tidak dilakukan lagi penjadwalan rapat rutin, sehingga intensitas pertemuan *online* maupun *offline* berkurang. Dalam situasi krisis harusnya terjadi pertukaran data dan informasi yang reguler dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk meminta dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk memastikan semua orang selalu *up-to-date*.<sup>26</sup> Informasi yang tepat waktu dan akurat bagi para anggota terkait dalam tanggap bencana sangat penting karena upaya penanggulangan bencana didasarkan pada fakta-fakta yang relevan mengenai situasi yang dihadapi. Agar berhasil merespons bencana, para aktor terkait harus memiliki pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang mungkin terjadi selanjutnya.<sup>27</sup>

### **Mekanisme Pengawasan Langsung**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten X sudah melakukan mekanisme pengawasan langsung. Pengawasan langsung berarti bahwa satu individu bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.<sup>28</sup> Gugus tugas COVID-19 Kabupaten selama ini dipimpin oleh ketua gugus tugas yaitu Bupati yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan COVID-19 oleh gugus tugas. Penetapan Bupati tersebut sebagai ketua sudah sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri No. 440/12622/SJ dimana tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah itu.<sup>4</sup>

Pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini di Kabupaten X dilakukan dengan monitoring dan evaluasi melalui laporan bidang Satgas, yang kemudian dibahas dalam rapat bersama Sekda dan diketahui oleh Bupati. Namun intensitas monitoring dan evaluasi sudah berkurang. Pemantauan dan evaluasi sangat penting untuk mendeteksi hambatan dan masalah guna menghilangkan atau mencegah hambatan tersebut untuk terulang kembali, meningkatkan kapasitas organisasi, serta meningkatkan kolaborasi penanganan kebencanaan di masa depan.<sup>29</sup> Selain itu, dapat mencegah terulangnya inkonsistensi dalam penanggulangan bencana, dan akan dimungkinkan untuk memberikan respons yang efektif dan mencapai tujuan bersama.<sup>30,31</sup>

### **Mekanisme Standarisasi Proses**

Pada standarisasi proses, anggota gugus tugas bekerja sesuai dengan instruksi pimpinan, uraian tugas di dalam SK Bupati, maupun petunjuk kerja dari pemerintah pusat (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) ataupun provinsi. Tidak ada pedoman atau buku petunjuk teknis yang dibuat oleh gugus tugas dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten X. Dalam pelaksanaannya, gugus tugas membuat perencanaan sendiri namun tetap mengacu kepada arahan pusat atau provinsi. Diharapkan setiap rencana yang dibuat oleh manajemen harus menjangkau seluruh anggota organisasi dan kemudian dipahami oleh seluruh anggota, sehingga proses pengembangan organisasi yang positif dapat dilakukan dan pada akhirnya mencapai keberhasilan. Selain itu, karena peran dan tanggung jawab sudah diberikan kepada setiap anggota dalam organisasi, anggota lainnya juga dapat mengawasi kegiatan organisasi tersebut.<sup>32</sup>

### **Upaya Meningkatkan Koordinasi**

Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau organisasi secara tunggal dapat diselesaikan dengan kerja sama.<sup>33</sup> Artinya dalam manajemen bencana seperti pandemi COVID-19 ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya berasaskan kebersamaan sehingga memang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama yang dilakukan secara gotong royong.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penanganan pandemi harus didasari dari kesadaran tugas bersama yang dibangun dengan baik agar dapat meningkatkan komitmen dalam proses penanganan COVID-19 dan berdampak pada terjalinnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.<sup>34</sup> Upaya untuk meningkatkan kesadaran anggota dalam bencana dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan tugasnya yaitu dengan memperjelas pembagian kerja dengan membuat uraian tugas yang jelas dari masing-masing sektor yang terlibat sehingga mereka menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal ini disebutkan dalam hasil penelitian bahwa yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan koordinasi antar sektor yaitu kejelasan dari peran dan tanggung jawab yang tegas<sup>35</sup>. Meskipun diketahui bahwa uraian tugas dari gugus tugas COVID-19 X sudah dituangkan dalam SK, namun uraian ini belum membagi kerja secara jelas per institusi. Selanjutnya memperbaiki kelancaran arus informasi di dalam gugus tugas. Sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tantangan dalam penyebaran informasi dapat mempengaruhi koordinasi tanggap darurat bencana, sebaliknya jika arus informasi lancar maka dapat meningkatkan kesadaran situasional.<sup>36</sup> Selain itu komunikasi harus dilakukan secara terbuka. Gugus tugas yang merupakan organisasi dimana terdiri dari berbagai perbedaan kategori sosial cenderung mendukung untuk adanya keterbukaan dalam komunikasi. Peningkatan keterbukaan komunikasi akan meningkatkan kinerja tim dan menjadikan tim lebih tangguh karena hubungan dengan lingkungan eksternalnya menjadi lebih erat.<sup>37</sup> Keterbukaan tidak hanya membuka peluang untuk mengetahui masalah yang sebenarnya ada, namun juga dapat mendorong kedalaman pemrosesan informasi, kesempatan untuk berbagi informasi unik, dan fungsi sosio-emosional dalam tim.<sup>38</sup>

Gugus tugas juga perlu untuk menjadwalkan kembali pertemuan rutin dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Menurut Achyar, terdapat empat faktor untuk menentukan pelaksanaan koordinasi dapat berjalan semakin efektif saat situasi bencana dan dua diantaranya adalah terkait ketersediaan forum dan evaluasi kegiatan.<sup>39</sup> Berdasarkan upaya yang sudah dilakukan dan pelaksanaan di lapangan, gugus tugas sebelumnya sudah memanfaatkan forum yang tersedia baik berupa pertemuan fisik dan non-fisik untuk komunikasi, pemberian dan pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan evaluasi. Sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa saat kondisi darurat memang dibutuhkan komunikasi untuk berbagi, bertukar informasi dan keahlian, serta pelaporan dan pengarahan.<sup>20</sup> Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa aspek kunci dan krusial dari semua fase manajemen darurat adalah pemahaman individu yang bertanggung jawab atas informasi dan pengetahuan tersebut.<sup>41</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan interaksi yang mendorong berbagi pengetahuan dan pengalaman agar semua memiliki sudut pandang yang sama, diharapkan hal tersebut akan membantu untuk meningkatkan pembelajaran organisasi dan ancaman akibat ketidakpastian dapat dikurangi.<sup>42</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penyediaan kembali forum koordinasi dengan catatan ditetapkan kembali dengan jadwal rutin yang jelas, maka diharapkan mampu meningkatkan koordinasi penanggulangan pandemi COVID-19. Walaupun kasus sudah melandai bukan berarti pandemi sudah dinyatakan berakhir.

Kelemahan dari penelitian ini adalah informan yang berjumlah 7 orang dan waktu penelitian yang singkat (1 bulan) mungkin dapat mempengaruhi kedalaman dan kerincian dari informasi yang diperoleh setelah dilakukannya pengumpulan data oleh peneliti. Namun peneliti tetap berusaha menggali informasi sedalam mungkin dengan informan yang ada dan memaparkan hasil penelitian apa adanya sesuai dengan temuan. Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu dapat menambah jumlah informan yang berasal dari instansi lain yang berbeda dan menambah waktu penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mekanisme koordinasi gugus tugas dalam penanggulangan COVID-19 Kabupaten X yang dominan dilakukan adalah mekanisme penyesuaian bersama dan pengawasan langsung. Guna meningkatkan koordinasi maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan kedua mekanisme tersebut yaitu dengan cara menyempurnakan standar yang digunakan pada situasi kebencanaan, seperti penyempurnaan uraian tugas dan fungsi dengan menambah uraian tugas dan fungsi yang lebih spesifik untuk tiap instansi agar masing-masing dari instansi tersebut dapat memahami tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, membuat alur komunikasi yang jelas untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi di dalam gugus tugas COVID-19. Ketersediaan forum koordinasi atau pelaksanaan pertemuan yang bersifat rutin dan terjadwal baik yang bersifat *offline* dan *online* perlu ditambah agar tercipta interaksi yang mendukung pertukaran informasi, pengalaman, pelaporan, pengarahan, dan evaluasi.

## REFERENSI

1. Presiden Republik Indonesia. Keppres Nomor 9 Tahun 2020. pdf. 9 (2020).
2. Indonesia, P. R. KEPPRES NO 12 TH 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. *Fundam. Nurs.* 18=30 (2020).
3. Bupati X. *Keputusan Bupati X tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten X.* (Bupati X, 2020).
4. Menteri Dalam Negeri. *SE Menteri Dalam Negeri No. 440/12622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.* (Kementerian Dalam Negeri, 2020).
5. UNISDR. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.* (UNISDR, 2015).
6. Noreen, N. et al. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic and Pakistan; Limitations and Gaps. *Limitations Gaps. Glob. Biosecurity 1,* (2020).
7. Paquet, M. & Schertzer, R. COVID-19 as a complex intergovernmental problem. *Can. J. Polit. Sci.* **53**, 343-347 (2020).
8. Cao, Y., Shan, J., Gong, Z., Kuang, J. & Gao, Y. Status and Challenges of Public Health Emergency Management in China Related to COVID-19. *Front. Public Heal.* **8**, 1-6 (2020).
9. Basnawi, C. Tantangan Koordinasi Terkait Manajemen Penanganan Coronavirus Disease 2019 ( COVID-19 ) Di Surabaya

- The Challenge Of Coordination In Management Of Coronavirus. **2019**, (2019).
10. Suriyanto, S., Alim, S., Nindrea, R. D. & Trisnantoro, L. Regional policy for disaster risk management in developing countries within the sendai framework: A systematic review. *Open Access Maced. J. Med. Sci.* **7**, 2213-2219 (2019).
  11. UNISDR. *UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction*. (UNISDR, 2009).
  12. Presiden Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. (Kementerian Hukum dan HAM, 2007).
  13. Harrison, S. E. & Johnson, P. A. Crowdsourcing the Disaster Management Cycle. *Int. J. Inf. Syst. Cris. Response Manag.* **8**, 17-40 (2017).
  14. Husein, A. & Onasis, A. *Manajemen Bencana*. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).
  15. WHO. Chapter 11: Public health emergencies. *Adv. right to Heal. vital role law* 165-180 (2013).
  16. Wilder-Smith, A. & Osman, S. Public health emergencies of international concern: A historic overview. *J. Travel Med.* **27**, 1-13 (2020).
  17. Khorram-Manesh, A., Berlin, J. & Carlström, E. Two Validated Ways of Improving the Ability of Decision-Making in Emergencies; Results from a Literature Review. *Bull. Emerg. trauma* **4**, 186-196 (2016).
  18. Martin, E., Nolte, I. & Vitolo, E. The Four Cs of disaster partnering: communication, cooperation, coordination and collaboration. *Disasters* **40**, 621-643 (2016).
  19. Mintzberg, H. The Structuring Of Organizations. in 1-16 (Prentice-Hall, 1979).
  20. Abbasi, A., Sadeghi-Niaraki, A., Jalili, M. & Choi, S. M. Enhancing response coordination through the assessment of response network structural dynamics. *PLoS One* **13**, 1-17 (2018).
  21. Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. Three approaches to qualitative content analysis. *Qual. Health Res.* **15**, 1277-1288 (2005).
  22. Utarini, A. *Penelitian Kualitatif Dalam Pelayanan Kesehatan*. (Gadjah Mada University Press, 2021).
  23. Suharto, T. Koordinasi lintas sektor pada tim sistem kewaspadaan pangan dan gizi di kabupaten sleman. (Universitas Gadjah Mada, 2004).
  24. Bharosa, N., Lee, J. & Janssen, M. Challenges and obstacles in sharing and coordinating information during multi-agency disaster response: Propositions from field exercises. *Inf. Syst. Front.* **12**, 49-65 (2010).
  25. Nespeca, V., Comes, T., Meesters, K. & Brazier, F. Towards coordinated self-organisation: An actor-centered framework for the design of disaster management information systems. *Int. J. Disaster Risk Reduct.* **51**, 101887 (2020).
  26. Thielsch, M. T., Röseler, S., Kirsch, J., Lamers, C. & Hertel, G. Managing Pandemics—Demands, Resources, and Effective Behaviors Within Crisis Management Teams. *Appl. Psychol.* **70**, 150-187 (2021).
  27. Seppänen, H. & Virrantaus, K. Shared situational awareness and information quality in disaster management. *Saf. Sci.* **77**, 112-122 (2015).
  28. Lunenburg, F. C. Organizational Structure\_ Mintzberg s Framework - PDF Free Download.pdf. **14**, 1-8 (2012).
  29. Bahadori, M., Khankeh, H. R., Zabolli, R., Ravangard, R. & Malmir, I. Barriers to and Facilitators of Inter-Organizational Coordination in Response to Disasters: A Grounded Theory Approach. *Disaster Med. Public Health Prep.* **11**, 318-325 (2017).
  30. Bedwell, W. L. et al. Collaboration at work: An integrative multi-level conceptualisation. *Hum. Resour. Manag. Rev.* **22**, 128-145 (2012).
  31. Shiva Yousefian, Jahangiri, K., Mehrab, Y. & Sohrabzadeh, S. Assessment of Intraorganizational Collaboration in the health sector during Disasters: Exploring a Valid and Reliable Assessment Tool for Disaster Risk Management. *Int. J. Prev. Med.* **13**, 1-16 (2022).
  32. Prabowo, A. D., Daya, I. R., Darma, S. & Sahputra, D. Tabularasa : Jurnal Ilmiah Magister Psikologi Perspektif Komunikasi dalam Pengembangan Organisasi. *Tabularasa J. Ilm. Magister Psikol.* **3**, 87-95 (2021).
  33. Parkash, S. Cooperation, coordination and team issues in disaster management: The need for a holistic and integrated approach. *Geol. Soc. Spec. Publ.* **419**, 57-61 (2015).
  34. Majid, A. I., Muchin, S. & Sunariyanto. INTERELATION INSTITUSIONAL COLLABORATION DALAM PENAGGULANGAN BENCANA COVID 19 DI KOTA MALANG ( Study Pada Satgas COVID-19 Kota Malang ) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65. *J. Respon Publik* **15**, 64-69 (2021).
  35. Huwaida, N. Analisis Koordinasi Antara Sektor Dalam Proses Pembangunan Kesehatan di Indonesia. (2021).
  36. Andreassen, N., Borch, O. J. & Sydnes, A. K. Information sharing and emergency response coordination. *Saf. Sci.* **130**, (2020).
  37. Bui, H., Chau, V. S., Degl'Innocenti, M., Leone, L. & Vicentini, F. The Resilient Organisation: A Meta-Analysis of the Effect of Communication on Team Diversity and Team Performance. *Appl. Psychol.* **68**, 621-657 (2019).
  38. Mesmer-Magnus, J. R. & DeChurch, L. A. Information Sharing and Team Performance: A Meta-Analysis. *J. Appl. Psychol.* **94**, 535-546 (2009).
  39. Achyar, E., Schmidt-Vogt, D. & Shivakoti, G. P. Dynamics of the multi-stakeholder forum and its effectiveness in promoting sustainable forest fire management practices in South Sumatra, Indonesia. *Environ. Dev.* **13**, 4-17 (2015).
  40. Becerra-Fernandez, I., Xia, W., Gudi, A. & Rocha, J. Task characteristics, knowledge sharing and integration, and emergency management performance: Research agenda and challenges. *Proc. ISCRAM 2008 - 5th Int. Conf. Inf. Syst. Cris. Response Manag.* 88-92 (2008).
  41. Abdel lateef Saeed, N., Hidayati Zakaria, N. & Nazir Ahmad, M. The use of Social Media in Knowledge Integration for Improving Disaster Emergency Management Task Performance: Review of Flood Disasters. *Indian J. Sci. Technol.* **9**, (2016).
  42. Kapucu, N., Arslan, T. & Demiroz, F. Collaborative emergency management and national emergency management network. *Disaster Prev. Manag. An Int. J.* **19**, 452-468 (2010).